

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang ditujukan untuk kepentingan praktis dimulai dari D-I, D-II, D-III, Sarjana Terapan, Magister Terapan dan Doktor Terapan yang berfungsi mengembangkan peserta didik agar memiliki pekerjaan keahlian terapan tertentu melalui program vokasi dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan yang mengarahkan mahasiswa untuk mengembangkan keahlian terapan, beradaptasi pada bidang pekerjaan tertentu dan dapat menciptakan peluang kerja.

Tujuan utama pendidikan vokasional adalah sebagai berikut; a. Meningkatkan jumlah peserta pelatihan yang berasal dari pendidikan tingkat menengah tinggi b. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan profesional yang diperlukan untuk praktik profesi c. Mengevaluasi tingkat pendidikan peserta, agar menjadi individu profesional yang kompetitif di masa depan (Zarifis, 2000). Adapun tujuan pendidikan vokasi secara spesifik berdasarkan Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi; adalah untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta ketrampilan peserta didik untuk hidup mandiri, dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai program kejuruannya agar dapat bekerja secara efektif dan efisien, mengembangkan keahlian dan keterampilannya, menguasai bidang keahlian dan dasar-dasar ilmu pengetahuan serta teknologi, memiliki etos kerja tinggi, berkomunikasi sesuai dengan tuntutan pekerjaannya, serta memiliki kemampuan dalam mengembangkan diri.

Pada saat ini pendidikan vokasi di perguruan tinggi juga diperuntukkan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus. Sehingga mereka perlu menerapkan sistem pendidikan inklusi untuk memfasilitasi peserta didik dalam proses perkuliahan. Pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan dimana peserta didik difabel menempuh pendidikan bersama dengan peserta didik nondifabel di sekolah

reguler dengan modifikasi kurikulum dan pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan siswa difabel (Yusuf, 2016). Konsep inklusi ini muncul sebagai tanggapan terhadap tantangan eksklusif pendidikan yang telah lama menjadi masalah dalam masyarakat. Di Indonesia program pendidikan inklusif sendiri dimulai sejak awal tahun 2000. Program ini merupakan kelanjutan program pendidikan terpadu yang pernah diadakan di Indonesia pada tahun 1980-an.

Purnawangsih (2022) menyebutkan pada dasarnya pendidikan inklusi memiliki prinsip yang bersandar pada PAPA (*Presence, Acknowledgement, Participation, Achievement*). *Presence* (hadir) maksudnya setiap peserta didik dapat hadir secara bersamaan pada setiap aktivitas atau kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah, *Acknowledgement* (diterima) prinsip ini menjelaskan bahwa peserta didik berhak diterima tanpa dibeda-bedakan, *Participation* (berpartisipasi) dalam sekolah inklusi, setiap peserta didik dapat ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan, *Achievement* (berprestasi) prinsip ini menekankan bahwa setiap peserta didik dapat berprestasi sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Dengan memahami prinsip PAPA tersebut sebuah satuan pendidikan dapat berperan sebagai sekolah inklusif. Ketika prinsip PAPA sudah diterapkan maka sekolah tersebut sudah siap menjadi sekolah inklusif, yaitu sekolah yang siap menyelenggarakan pendidikan tanpa adanya diskriminasi dan perbedaan.

Pentingnya pendidikan inklusi di perguruan tinggi tergambar dengan jelas dalam beberapa aspek utama yaitu terwujudnya akses yang setara bagi mahasiswa berkebutuhan khusus, sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, menjembatani kesenjangan sosial, dan menghapus hambatan yang ada bagi individu dengan kebutuhan khusus. Pendidikan inklusi memastikan bahwa setiap individu, terlepas dari perbedaan kemampuan atau latar belakang, memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi, meraih pengetahuan, dan pengembangan diri melalui pendidikan tinggi (Humas, 2023).

Dengan bertambahnya jumlah individu disabilitas yang mendaftar dan diterima di perguruan tinggi menjadi alasan bagi pemerintah untuk memberikan landasan hukum agar dapat membantu mereka mendapatkan pelayanan dan pendidikan yang sesuai

dengan kebutuhan mereka. Salah satu landasan hukum bagi mahasiswa berkebutuhan khusus adalah Peraturan Menteri Rises, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No.46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi. Dalam pasal 4 dijelaskan bahwa pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dilaksanakan dalam sistem inklusi. Oleh karena itu perguruan tinggi dapat membuat program khusus untuk mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan hambatan dan kebutuhan mereka.

Selain itu untuk penanganan dalam pencegahan diskriminasi dan intoleransi di sekolah termasuk perundungan dan kekerasan seksual, Menteri Pendidikan Nadiem Anwar Makarim mengeluarkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Menurut Itjen Kemdikbud (2023) bentuk kekerasan yang diatur dalam Permendikbudristek ini adalah: a.) Kekerasan fisik; b) Kekerasan psikis; c) Perundungan; d) Kekerasan seksual; e) Diskriminasi dan intoleransi; f) Kebijakan yang mengandung kekerasan; g) Bentuk kekerasan lainnya. Bentuk kekerasan tersebut dapat dilakukan secara fisik, verbal, nonverbal, dan/atau melalui media teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga dengan adanya aturan ini semua peserta didik termasuk peserta didik disabilitas akan mendapatkan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan.

Namun dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di perguruan tinggi masih banyak kita temui kendala-kendala seperti model pembelajaran yang tidak adaptif, lingkungan sosial yang belum ramah, dan sarana prasarana yang belum bisa diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus. Dalam lingkup perguruan tinggi akan memerlukan waktu yang panjang untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas dan penerapan pendidikan inklusi secara sempurna (Moriña, 2017). Selain itu menurut Muhibbin (2021) permasalahan lain yang dihadapi oleh mahasiswa berkebutuhan khusus (MBK) adalah mencari perguruan tinggi yang memiliki layanan dan fasilitas yang memadai dalam menunjang proses pembelajaran mereka, karena dalam prakteknya pada perguruan tinggi di Indonesia, tidak semua kampus siap melaksanakan program inklusi. Sedangkan menurut Riyadi (2021) dalam menunjang pendidikan inklusi di perguruan tinggi, salah satu komponen yang berperan penting adalah

aksesibilitas. Kemudahan akses bertujuan agar MBK memiliki kesempatan yang sama dengan mahasiswa lainnya dalam proses belajar mengajar. Jadi merupakan keharusan jika perguruan tinggi menyediakan “aksesibilitas” tersebut. Aksesibilitas dapat diartikan sebagai kemudahan dalam hal lingkungan fisik, sikap, dan perlakuan lingkungan terhadap penyandang disabilitas. Dalam lingkup perguruan tinggi, aksesibilitas berarti kampus dapat diakses secara fisik dan tersedianya akomodasi yang memadai. Selain aksesibilitas, komponen yang juga penting bagi MBK adalah mobilitas, yaitu kemampuan bergerak maupun digerakkan.

Dalam pelaksanaan pendidikan inklusif yang bermutu khususnya di perguruan tinggi perlu adanya proses perbaikan yang berkelanjutan. Evaluasi pelaksanaan pendidikan inklusif dapat dilakukan dengan menggunakan suatu indeks yang disebut *Index for Inclusion*. Menurut Booth dan Ainscow (2011) *Index for Inclusion* adalah sumber informasi untuk mendukung pengembangan sekolah inklusi yaitu berupa alat evaluasi diri yang telah dirancang secara khusus untuk membantu proses pengembangan pendidikan inklusif. Avau, dkk (2012) menjelaskan bahwa indeks ini dapat dimodifikasi dan disesuaikan oleh lembaga individu dalam proses evaluasi.

Menurut Booth T, Ainscow M & Kingston D (2006) *Index for Inclusion* mencakup 3 dimensi yaitu dimensi budaya (*creating inclusive cultures*), dimensi kebijakan (*producing inclusive policies*), dan dimensi praktik (*evolving inclusive practices*).1) Dimensi budaya (*creating inclusive cultures*) menciptakan budaya inklusif dengan menciptakan sebuah jaminan, penerimaan, kolaborasi, stimulasi komunitas, dimana setiap orang merasa dihargai. 2) Dimensi kebijakan (*producing inclusive policies*) menghasilkan kebijakan inklusif dengan menyebarkan semua rencana untuk pengaturan. Semua pengaturan mengarahkan pada strategi perubahan inklusi. 3) Dimensi praktik (*evolving inclusive practices*) mengembangkan praktik inklusif dengan mengembangkan aktivitas yang mencerminkan kepada budaya dan kebijakan inklusif.

Adapun dalam pemenuhan kesamaan kesempatan terhadap penyandang disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang nomor 8 tahun 2016 yang bertujuan untuk memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk

penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak, mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermanfaat.

Salah satu hal yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan tinggi dalam menjalankan sistem inklusi adalah pengelolaan pada manajemen perguruan tinggi. Manajemen perguruan tinggi adalah proses penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan mendayagunakan semua sumber daya yang ada secara optimal untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Prasarana dan sarana fisik serta sumberdaya manusia yang dimiliki perguruan tinggi tidak akan berdaya guna bila tidak dikelola melalui manajemen yang baik. Sehingga ketika manajemen perguruan tinggi dilaksanakan dengan efektif dan efisien, *output* yang dihasilkan akan berkualitas dan berdayaguna.

Menurut Suharsaputra (2015) manajemen perguruan tinggi sebagai proses pengelolaan yang mencakup perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) dalam pendayagunaan sumber daya pendidikan guna melaksanakan peran dan tugas tridharma perguruan tinggi melalui strategi yang memperhatikan lingkungan internal dan eksternal dalam mencapai tujuan dengan suatu konteks kepemimpinan pendidikan.

Salah satu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam setting inklusi adalah Akademi Tata Boga Bandung (ATB Bandung). Perguruan tinggi tersebut merupakan pelopor kampus seni kuliner pertama di Indonesia yang sudah berdiri sejak tahun 1996, dan para alumninya sudah tersebar di dalam negeri maupun luar negeri, yang bekerja di industri perhotelan, catering, restoran, kapal pesiar, rumah sakit, *pastry bakery shop*, *supplier* bahan makanan, maupun berwirausaha sebagai *owner*.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara awal pada tanggal 20 September 2023 yang dilakukan oleh peneliti di ATB Bandung, diperoleh informasi bahwa program inklusi ATB Bandung sudah dilaksanakan sejak tahun 2017 sebagai implementasi dari Permenristekdikti No. 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan tinggi. Program inklusi diperuntukkan bagi bagi

mahasiswa berkebutuhan khusus (MBK) yang sudah menamatkan sekolah menengah atas baik dari SMALB, SMA Inklusi, maupun SMK. Dalam pelaksanaannya sudah tersedia beberapa faktor pendukung seperti adanya tim program inklusi yang memandu dan mengorganisir pelaksanaan pendidikan inklusi di ATB Bandung, adanya pendamping khusus yang bertugas membantu mahasiswa berkebutuhan khusus mengikuti perkuliahan akademik, praktik, dan PKL. Namun pada fasilitas fisik untuk mahasiswa berkebutuhan khusus masih sangat sedikit, yaitu baru ada lerengan ramp untuk pengguna kursi roda.

Manajemen pendidikan inklusi yang dilaksanakan program inklusi ATB Bandung meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan evaluasi. Pada perencanaan, ATB Bandung memiliki tujuan yang ingin dicapai pada program inklusi tersebut. Pada pengorganisasian, ATB Bandung telah membentuk tim layanan program inklusi yang bertujuan untuk memberikan layanan dan fasilitas bagi mahasiswa berkebutuhan khusus. Pada pengelolaan, ATB Bandung sudah melaksanakan pengelolaan terhadap kurikulum, sarana prasarana, pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, serta sumber biaya. Pada evaluasi, ATB Bandung telah melaksanakan evaluasi terhadap program inklusi yang dilaksanakan setiap tahunnya.

Program inklusi ATB Bandung sudah melaksanakan beberapa kegiatan yang mendukung pelaksanaan program yaitu : 1) Mensosialisasikan program inklusi ATB Bandung ke sekolah-sekolah menengah atas yang memiliki siswa berkebutuhan khusus dan melalui berbagai sosial media. 2) Kegiatan *open house* atau buka dapur, pada kegiatan ini peserta didik dari sekolah-sekolah menengah atas baik yang memiliki disabilitas maupun non disabilitas dapat mengunjungi dapur ATB Bandung dan mendapatkan edukasi tentang pendidikan tata boga, selain itu ada kegiatan memasak bersama (*cooking class*) yang dipandu oleh chef yang merupakan pengajar di ATB Bandung. 3) Kegiatan Swaster atau studi wawasan almamater yang diadakan sebelum awal perkuliahan semester satu. Pada kegiatan ini tim Program Inklusi akan memberikan edukasi tentang pendidikan inklusi dan bagaimana cara berinteraksi kepada teman sekelas yang merupakan penyandang disabilitas.

ATB Bandung sebagai perguruan tinggi yang melaksanakan pendidikan vokasional bagi mahasiswa berkebutuhan khusus, tentu perlu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen pendidikan vokasional bagi MBK untuk mengetahui letak kelemahan dan kekuatan dalam pelaksanaan program tersebut sangat dipengaruhi oleh subjektivitas evaluator itu sendiri. Menurut Firman dan Aji (1990, hlm. 29) evaluasi adalah sebagai salah satu dari fungsi manajemen yang berusaha untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi hasil pelaksanaan dari sebuah rencana dan mengukur seobjektif mungkin dari hasil pelaksanaan dengan ukuran yang dapat diterima pihak yang mendukung maupun yang tidak mendukung dari suatu perencanaan. Nababan, dkk (2022) menyatakan hasil evaluasi program dapat digunakan untuk menentukan nilai maupun tingkat keberhasilan suatu program ditinjau dari efektivitas maupun efisiensinya. Sudut pandang yang digunakan diantaranya dari pemerintah, masyarakat sebagai pengguna, dan pendidik dilihat dari sisi efektivitas, pengelolaan, kebermanfaatan pengelolaan, hasil dan dampak pengelolaan, dan lain-lain.

Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan sebuah studi evaluatif deskriptif pada pelaksanaan manajemen pendidikan vokasional bagi MBK yang diselenggarakan oleh Akademi Tata Boga Bandung. Model evaluasi yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah CIPP (*Context evaluation, input evaluation, process evaluation and product evaluation*) yang dikembangkan oleh Stufflebeam, (1967). Evaluasi model CIPP dipilih karena merupakan kerangka yang komprehensif untuk mengarahkan pelaksanaan evaluasi formatif dan evaluasi sumatif terhadap objek program, proyek, personalia, produk, institusi dan sistem. Model evaluasi ini dipakai secara meluas diseluruh dunia dan dipakai untuk mengevaluasi berbagai disiplin ilmu dan layanan misalnya pendidikan, perumahan, pengembangan dan masyarakat.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, fokus masalah dalam penelitian ini adalah mengkaji secara mendalam atau studi evaluatif terhadap pelaksanaan manajemen pendidikan vokasional yang sudah dilakukan oleh Akademi Tata Boga Bandung. Penelitian evaluatif ini menggunakan model evaluatif CIPP yang dikembangkan oleh Stufflebeam, terdiri dari 4 komponen yaitu *Context Evaluation*, *Input Evaluation*, *Process Evaluation*, dan *Product Evaluation* yang saling berkaitan. Penelitian ini dilakukan di Akademi Tata Boga Bandung.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian berdasarkan fokus masalah diatas sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah evaluasi terhadap komponen konteks pada pelaksanaan manajemen pendidikan vokasional bagi mahasiswa berkebutuhan khusus di ATB Bandung ?
- 2) Bagaimanakah evaluasi terhadap komponen input pada pelaksanaan manajemen pendidikan vokasional bagi mahasiswa berkebutuhan khusus di ATB Bandung ?
- 3) Bagaimanakah evaluasi terhadap komponen proses pada pelaksanaan manajemen pendidikan vokasional bagi mahasiswa berkebutuhan khusus di ATB Bandung ?
- 4) Bagaimanakah evaluasi terhadap komponen produk pada pelaksanaan manajemen pendidikan vokasional bagi mahasiswa berkebutuhan khusus di ATB Bandung ?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh hasil evaluasi manajemen pendidikan vokasional bagi mahasiswa berkebutuhan khusus yang diselenggarakan oleh Akademi Tata Boga Bandung. Dari hasil evaluasi tersebut peneliti dapat memberikan masukan dan rekomendasi guna terwujudnya kinerja manajemen yang lebih baik kedepannya.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Untuk mendeskripsikan hasil evaluasi pada komponen konteks, dari pelaksanaan manajemen pendidikan vokasional bagi mahasiswa berkebutuhan khusus di ATB Bandung, yang meliputi landasan hukum program dan tujuan program.
- 2) Untuk mendeskripsikan hasil evaluasi pada komponen input, dari pelaksanaan manajemen pendidikan vokasional bagi mahasiswa berkebutuhan khusus di ATB Bandung, yang meliputi kurikulum, sarana dan prasarana, penerimaan mahasiswa baru berkebutuhan khusus, persyaratan administratif dosen program inklusi, persyaratan administratif pendamping khusus, dan sumber pendanaan.
- 3) Untuk mendeskripsikan hasil evaluasi pada komponen proses, dari pelaksanaan manajemen pendidikan vokasional bagi mahasiswa berkebutuhan khusus di ATB Bandung, yang meliputi perkuliahan akademik, perkuliahan praktik, praktik kerja lapangan (PKL), kompetensi dosen program inklusi, kompetensi pendamping khusus.
- 4) Untuk mendeskripsikan hasil evaluasi pada komponen produk, dari pelaksanaan manajemen pendidikan vokasional bagi mahasiswa berkebutuhan khusus di ATB Bandung, yaitu hasil belajar MBK.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi rujukan dan tambahan kajian teoritis bagi pengembang ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pendidikan khusus untuk mempelajari pelaksanaan manajemen pendidikan vokasional bagi mahasiswa berkebutuhan khusus di perguruan tinggi.

1.4.3 Manfaat Praktis

- 1) Dapat memberikan gambaran dan panduan bagi seluruh *stakeholder* perguruan tinggi yang melaksanakan pendidikan vokasional bagi mahasiswa berkebutuhan khusus.

- 2) Dapat memberikan gambaran data bagi pemerintah dan dinas pendidikan tentang manajemen pendidikan vokasional bagi mahasiswa berkebutuhan khusus di perguruan tinggi khususnya akademi sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan tentang pendidikan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus.
- 3) Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan masukan dan rekomendasi bagi Akademi Tata Boga Bandung dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan vokasional bagi mahasiswa berkebutuhan khusus agar lebih baik lagi kedepannya.